



PEMERINTAH KOTA CIREBON  
**PANITIA SELEKSI INSTANSI**  
**PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**  
**KOTA CIREBON TAHUN 2024**

Jalan Tanda Barat No. 33, Cirebon 45124 ☎ (0231) 246402

PENGUMUMAN

Nomor : 810/001-PANSEL/2024

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kota Cirebon membuka kesempatan bagi Putra/Putri terbaik Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Pegawai Negeri Sipil Kerja (PNS) dengan ketentuan sebagai berikut:

**I. DASAR PELAKSANAAN**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024.
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini secara umum. Seluruh pelamar **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud.

**II. PENETAPAN KEBUTUHAN PNS**

1. Penetapan Kebutuhan PNS Kota Cirebon Tahun 2024 sejumlah 124 (seratus dua puluh empat), dengan rincian :

Alokasi Kebutuhan	Kebutuhan Umum	Kebutuhan Khusus	Total Alokasi Kebutuhan
Tenaga Kesehatan	6	-	6
Tenaga Teknis	116	2	118
<b>TOTAL</b>	<b>122</b>	<b>2</b>	<b>124</b>

2. Rincian Penetapan Kebutuhan PNS Kota Cirebon Tahun 2024 tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.
3. Deskripsi pekerjaan dan rentang penghasilan untuk masing-masing Jabatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2024 dapat dilihat pada portal SSCASN.

### III. KRITERIA PELAMAR

#### 1. Kebutuhan Umum

Pelamar lulusan Perguruan Tinggi dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sederajat yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini;

#### 2. Kebutuhan Khusus

**Kebutuhan khusus penyandang disabilitas**, Pelamar lulusan Perguruan Tinggi yang memiliki keterbatasan atau kekurangan (disabilitas) fisik tertentu yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini;

### IV. PERSYARATAN

1. Setiap **Warga Negara Indonesia** mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. usia paling rendah **18 (delapan belas)** tahun dan paling tinggi **35 (tiga puluh lima)** tahun pada saat melamar PNS, **dikecualikan** bagi pelamar untuk jabatan dokter dan dokter gigi, dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis batas usia paling tinggi **40 (empat puluh)** tahun pada saat melamar;
- b. **tidak pernah dipidana dengan pidana penjara** berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- c. **tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat** sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- d. **tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;**
- e. **tidak menjadi anggota atau pengurus partai** politik atau terlibat politik praktis;
- f. **memiliki kualifikasi pendidikan** sesuai dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Pendidikan Sekolah Menengah Atas/sederajat yang **terdaftar** di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, dengan rata-rata nilai ujian pada ijazah tidak kurang dari 70,00 dengan skala 100,00 dan bukan hasil dari pembulatan;
  - b) Perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang **terakreditasi** pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat tahun kelulusan, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima);
  - c) Perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah **disetarakan** oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
- g. **memiliki kompetensi** yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- h. **sehat jasmani dan rohani** sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- i. **pelamar jabatan Polisi Pamong Praja Pemula** pada Surat Keterangan Sehat **wajib** mencantumkan peruntukan "Melamar Formasi Pol PP" dengan syarat tinggi badan :
  - a) Pria minimal **160 cm**

- b) Wanita minimal **155 cm**
  - j. **bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia** atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan
  - k. **persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK;**
2. **Pelamar penyandang disabilitas** harus memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut:
- a. melampirkan **surat keterangan dari dokter** rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
  - b. menyampaikan **video singkat** yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

## V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman dan Pendaftaran Seleksi Pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2024 dilaksanakan pada portal SSCASN (<https://sscasn.bkn.go.id/>) dan <https://bkpsdm.cirebonkota.go.id>.
2. Seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.
3. Pelamar wajib memahami dan menaati tata cara dan syarat pendaftaran dengan cermat dan teliti.

## VI. DOKUMEN UNGGAH

Pelamar wajib mengunggah (*upload*) dokumen pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dalam bentuk *softcopy* yang meliputi :

1. **Pasfoto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah.**
  2. Scan berwarna **Kartu Tanda Penduduk Asli/ Surat Keterangan Pengganti KTP** yang masih berlaku/ **Surat Keterangan Perekaman KTP-el asli**, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku.
  3. Scan berwarna **Ijazah Asli**, sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, dengan ketentuan :
    - a. Pendidikan **Sekolah Menengah Atas/ sederajat** wajib melampirkan cetakan tangkapan layar (**screen capture**) **terdaftar** di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
    - b. Pendidikan **S1/DIV** wajib melampirkan **ijazah asli** sesuai kualifikasi pendidikan.
    - c. Pendidikan **Profesi dan Spesialis** wajib menambahkan **ijazah S-1/D-IV dan Profesi atau Spesialis.**
    - d. Lulusan **Perguruan Tinggi Luar Negeri**, wajib melampirkan **surat keputusan penyetaraan ijazah** dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- (Dokumen digabungkan dalam satu file dengan ijazah Asli).**
4. **Surat Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi** dengan ketentuan :
    - a. scan **Surat Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi pada saat kelulusan**, yang diperoleh dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, **atau**
    - b. **cetakan tangkapan layar (screen capture)** dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang memuat status akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi pelamar **pada saat kelulusan** yang berasal dari portal <https://banpt.or.id>.
- (Dokumen digabungkan dalam satu file dengan ijazah Asli).**
5. Scan berwarna **Transkrip Nilai** dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dipersyaratkan. Tambahan khusus:
    - a. Bagi **Pendidikan Profesi** agar melampirkan transkrip nilai **S-1/D-VI** dan

**Profesi.**

- b. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib melampirkan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
6. Scan berwarna **Transkrip/Daftar Nilai/ Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional asli untuk Pendidikan SMA/ sederajat**
7. Scan berwarna **Surat lamaran Lamaran** ditujukan kepada Pj.WALI KOTA CIREBON c.q. Ketua Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai ASN Tahun 2024. **Diketik menggunakan komputer, ditandatangani dengan pena bertinta hitam/biru, dibubuhi materai elektronik** (e-materai Rp. 10.000) dan dibuat sesuai format (**Lampiran II**).
8. Scan berwarna **Surat Pernyataan 5 (lima) point. Diketik menggunakan komputer, ditandatangani dengan pena bertinta hitam/biru, dibubuhi materai elektronik** (e-materai Rp. 10.000) dan dibuat sesuai format (**Lampiran III**).
9. Scan berwarna **Surat Tanda Register (STR)** asli bagi pelamar Jabatan Fungsional Kesehatan yang mensyaratkan STR. **Bukan STR Internship dan masih berlaku pada saat melamar**, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR.
10. Bagi **Pelamar Jabatan Polisi Pamong Praja Pemula** wajib melampirkan Scan berwarna **Surat Keterangan Sehat Asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas dengan mencantumkan peruntukan “Melamar Formasi PoIPP”** dengan syarat tinggi badan :
  - a. Pria minimal **160 cm**
  - b. Wanita minimal **155 cm**
11. Bagi pelamar **Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas** wajib melampirkan :
  - a. Scan berwarna **Surat Keterangan Asli Dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas** yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasinya. (**lampiran IV**)
  - b. **Link vidio** singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
12. Bagi pelamar **Jabatan Fungsional Tenaga Teknis** (jabatan tertentu) **wajib mengunggah Persyaratan Wajib Tambahan dan dapat mengunggah sertifikat kompetensi** sesuai dengan ketentuan persyaratan jabatan fungsional yang dilamar.
13. **Seluruh dokumen yang diunggah diwajibkan ASLI, berwarna/bukan hitam putih, bukan fotokopi, jelas dan terbaca dengan cara di scan berwarna.**

## VII. JADWAL TAHAPAN SELEKSI PENGADAAN PNS

Jadwal pelaksanaan Seleksi Pengadaan PNS sesuai Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara 8419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 perihal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024:

NO.	KEGIATAN	JADWAL*
1.	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d. 2 September 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3.	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5.	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d. 28 September 2024
6.	Masa sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7.	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024

8.	Pengumuman Pasca Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9.	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10.	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12.	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13.	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14.	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15.	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d. 17 Desember 2024
16.	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17.	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18.	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19.	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS	4 s.d. 8 Desember 2024
21.	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22.	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23.	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d. 12 Januari 2025
24.	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25.	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26.	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27.	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28.	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29.	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

### VIII. KETENTUAN LAIN

1. Pelamar wajib memantau seluruh proses tahapan Seleksi Pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon melalui portal PANSELNAS dengan alamat <https://sscasn.bkn.go.id> dan portal BKPSDM Kota Cirebon dengan alamat <https://bkpsdm.cirebonkota.go.id/>.
2. Dokumen pelamaran yang telah diunggah tidak dapat diperbaiki jika pelamar mengklik akhiri pendaftaran sesuai mekanisme SSCASN.
3. Kesalahan pengisian data dan/atau pengunggahan dokumen yang dilakukan oleh pelamar dapat menggugurkan keikutsertaan pada Seleksi Pengadaan PNS Kota Cirebon.
4. Pelamar yang memberikan keterangan/data/dokumen tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan, maupun setelah diangkat PNS, akan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan Pemerintah Kota Cirebon berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status PNS.
5. Pelamar dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
6. Pelamar, keluarga, dan/atau pihak terkait dilarang memberikan sesuatu dalam

- bentuk apapun kepada Panitia Seleksi dan pihak-pihak lain di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, apabila diketahui akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
7. Pemerintah Kota Cirebon tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan ASN Kota Cirebon Tahun 2024.
  8. Seluruh proses Seleksi Pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2024 **tidak dipungut biaya** dalam bentuk apapun;
  9. Panitia Seleksi Instansi Pengadaan ASN Kota Cirebon Tahun Anggaran 2024 membuka layanan helpdesk melalui :  
**Instagram** : <https://s.id/bkpsdmkotacirebon>  
**Whatsapp** : JF Tenaga Kesehatan : 0822 9506 7593  
JF Tenaga Teknis : 0851 8312 4736  
[hanya menerima WhatsApp] pada hari **Senin s.d. Jumat pukul 08:00 s.d. 16:00 WIB**
  10. Keputusan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan ASN Kota Cirebon Tahun 2024, bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Ditetapkan di Cirebon  
Pada tanggal 19 Agustus 2024  
Pj. Sekretaris Daerah Kota Cirebon  
Selaku

Ketua Panitia Seleksi Instansi  
Pengadaan Pegawai ASN  
Kota Cirebon Tahun 2024,



MOHAMMAD ARIF KURNIAWAN, ST.

## Lampiran I

### RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON TAHUN 2024

#### A. TENAGA KESEHATAN

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
<b>A.</b>	<b>TENAGA KESEHATAN</b>	<b>6</b>		
1.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH TORAKS, KARDIAK DAN VASKULAR	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON-DINAS KESEHATAN-RUMAH SAKIT DAERAH GUNUNG JATI-WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN-BIDANG PELAYANAN MEDIS	
2.	DOKTER AHLI PERTAMA - SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON-DINAS KESEHATAN-RUMAH SAKIT DAERAH GUNUNG JATI-WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN-BIDANG PELAYANAN MEDIS	
3.	DOKTER AHLI PERTAMA - SPESIALIS NEUROLOGI	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON-DINAS KESEHATAN-RUMAH SAKIT DAERAH GUNUNG JATI-WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN-BIDANG PELAYANAN MEDIS	
4.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON-DINAS KESEHATAN-PUSKESMAS JAGASATRU	
5.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI SPESIALIS PERIODONSIA	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON-DINAS KESEHATAN-RUMAH SAKIT DAERAH GUNUNG JATI-WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN-BIDANG PELAYANAN MEDIS	
6.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON-DINAS KESEHATAN-PUSKESMAS JALAN KEMBANG	

## B. TENAGA TEKNIS

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
<b>B.</b>	<b>TENAGA TEKNIS</b>		<b>118</b>		
1.	ANALIS KEBAKARAN AHLI PERTAMA	D-IV/S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV/S-1 EKONOMI	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN   BIDANG PENGENDALIAN, PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN	
2.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA   BIDANG KEPEMUDAAN	
3.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 STATISTIKA ; S-1 MATEMATIKA	4	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	<b>Sejumlah 1 (satu) formasi hanya dapat dilamar oleh penyandang disabilitas</b>
4.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN	2	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS PENDIDIKAN	
5.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV KEARSIPAN ; D-IV/S-1 EKONOMI ; D-IV/S-1 MANAJEMEN ; S-1 KEARSIPAN ; S-1 HUKUM ; D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
6.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 KEARSIPAN ; D-IV KEARSIPAN ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI NEGARA	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS PENDIDIKAN   SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
7.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEARSIPAN ; S-1 KEARSIPAN	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS PERHUBUNGAN   SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
8.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEARSIPAN ; S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN   SEKRETARIAT DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	



9.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM ; D-IV KEARSIPAN ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI ; S-1 KEARSIPAN ; D-IV ADMINISTRASI NEGARA	2	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
10.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 KEARSIPAN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS PEMUDA DAN OLAHRAHA	
11.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEARSIPAN ; S-1 KEARSIPAN ; S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   SEKRETARIAT DPRD   BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	
12.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN ; D-III EKONOMI ; D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN   SEKRETARIAT DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
13.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN ; D-III KEARSIPAN	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
14.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN ; D-III MANAJEMEN ; D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN PEMASARAN	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
15.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III EKONOMI ; D-III MANAJEMEN ; D-III AKUNTANSI ; D-III KEARSIPAN	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   KECAMATAN KEJAKSAN	
16.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU KOMUNIKASI	2	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN   SEKRETARIAT DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
17.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK   SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK   SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	
18.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 HUKUM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN   BIDANG PERINDUSTRIAN	
19.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 HUKUM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK   SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN	

				STATISTIK   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
20.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 HUKUM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   KECAMATAN PEKALIPAN   SEKRETARIAT KECAMATAN PEKALIPAN   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
21.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 HUKUM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN   SEKRETARIAT DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN   SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	
22.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 HUKUM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	
23.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 HUKUM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   PELAKSANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   KEPALA SEKRETARIAT	
24.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 HUKUM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   KECAMATAN PEKALIPAN   SEKRETARIAT KECAMATAN PEKALIPAN   SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	
25.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN   BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
26.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
27.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   INSPEKTORAT DAERAH   INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS	
28.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 HUKUM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	
29.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 HUKUM ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   INSPEKTORAT DAERAH   INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II	

30.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 HUKUM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH   SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
31.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 HUKUM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA   BIDANG KEPARIWISATAAN	
32.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 HUKUM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
33.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 HUKUM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   KECAMATAN LEMAHWUNGKUK   SEKRETARIAT KECAMATAN LEMAHWUNGKUK   SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	
34.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN UMUM	
35.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 HUKUM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN   BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
36.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN ORGANISASI	
37.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 HUKUM ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   INSPEKTORAT DAERAH   INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III	
38.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 HUKUM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS TENAGA KERJA   SEKRETARIAT DINAS TENAGA KERJA   SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	
39.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN   SEKRETARIAT DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	

40.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS LINGKUNGAN HIDUP   SEKRETARIAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
41.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 HUKUM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   KECAMATAN LEMAHWUNGKUK   SEKRETARIAT KECAMATAN LEMAHWUNGKUK   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
42.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 HUKUM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   KECAMATAN LEMAHWUNGKUK   SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
43.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 HUKUM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA   BIDANG KEBUDAYAAN	
44.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 HUKUM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   SEKRETARIAT DPRD   BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	
45.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 HUKUM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN   SEKRETARIAT DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN   SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	
46.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 HUKUM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN   UPT PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN   SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	
47.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUKUM ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
48.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 HUKUM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS SOSIAL   SEKRETARIAT	
49.	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS TENAGA KERJA	

50.	OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
51.	PARAMEDIK VETERINER PEMULA	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BIDANG KESEHATAN HEWAN	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN   UPT RUMAH POTONG HEWAN	
52.	PELATIH OLAHRAGA AHLI PERTAMA	S-1 REKAYASA KEOLAHRAGAAN ; S-1 MANAJEMEN OLAHRAGA ; S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN ; S-1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
53.	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR ; S-1 ARSITEKTUR ; D-IV TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK SIPIL	3	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
54.	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	
55.	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR ; S-1 ARSITEKTUR ; D-IV TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 PLANOLOGI ; D-IV PLANOLOGI	3	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
56.	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 STATISTIKA ; S-1 ILMU KOMUNIKASI	2	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
57.	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
58.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN   SEKRETARIAT DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
59.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,	

	INFORMASI	SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
60.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH   SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
61.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
62.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS TENAGA KERJA   SEKRETARIAT DINAS TENAGA KERJA   SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	
63.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA   SEKRETARIAT DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
64.	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT ; D-IV KEPERAWATAN ; S-1 KEPERAWATAN	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	
65.	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT ; D-IV KEPERAWATAN ; S-1 KEPERAWATAN	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK	
66.	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
67.	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	S-1 ARSITEKTUR ; S-1 PLANOLOGI ; S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK GEODESI ; S-1 GEOGRAFI	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
68.	PENGAWAS JARINGAN UTILITAS	S-1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN   BIDANG PERUMAHAN, PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS	

69.	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK KIMIA	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
70.	PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT	D-IV TRANSPORTASI DARAT	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS PERHUBUNGAN   BIDANG ANGKUTAN DAN MULTIMODA   SEKSI PENYEDIAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ANGKUTAN	
71.	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN   BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
72.	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK PENGAIRAN ; S-1 ARSITEKTUR	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
73.	PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INDUSTRI	2	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN   BIDANG KOPERASI DAN UKM	
74.	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN AHLI PERTAMA	S-1 AGRONOMI TANAMAN ; S-1 BIOLOGI TUMBUHAN ; S-1 AGROTEKNOLOGI ; S-1 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN   UPT BALAI PENGEMBANGAN BENIH TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	
75.	PENGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   KECAMATAN KEJAKSAN	
76.	PENGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   KECAMATAN PEKALIPAN	
77.	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; D-IV PEKERJAAN SOSIAL ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS SOSIAL   BIDANG PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
78.	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV AKUNTANSI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 STATISTIK ; S-1 EKONOMI	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   SEKRETARIAT	
79.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA/PLANOLOGI	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH   BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	
80.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS SOSIAL   SEKRETARIAT	

81.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA/PLANOLOGI	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH   BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
82.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 HUKUM ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
83.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA/PLANOLOGI	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH   BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	
84.	PETUGAS TRANSPORTASI DARAT	D-III LLAJ	2	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS PERHUBUNGAN   BIDANG LALU LINTAS	
85.	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT	3	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
86.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA	3	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   KECAMATAN KESAMBI	<b>Sejumlah 1 (satu) formasi hanya dapat dilamar oleh penyandang disabilitas</b>
87.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA   SEKRETARIAT DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
88.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS KESEHATAN   SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
89.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III MANAJEMEN INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
90.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
91.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	



92.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
93.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   KECAMATAN KEJAKSAN	
94.	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA ; D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	2	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, MUTASI DAN PROMOSI	
95.	SANDIMAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ELEKTRO ; D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER ; D-IV TEKNIK KOMPUTER ; S-1 INFORMATIKA ; S-1 MATEMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK   BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI	
96.	SURVEYOR PEMETAAN TERAMPIL	D-III SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS	1	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON   DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK   BIDANG STATISTIK SEKTORAL	

Ditetapkan di Cirebon  
 Pada tanggal 19 Agustus 2024  
 Pj. Sekretaris Daerah Kota Cirebon  
 Selaku

Ketua Panitia Seleksi Instansi  
 Pengadaan Pegawai ASN  
 Kota Cirebon Tahun 2024,



MOHAMMAD ARIF KURNIAWAN, ST.

**Lampiran II**  
**CONTOH SURAT LAMARAN**

....., ..... 2024

Hal : Lamaran PNS

Kepada  
Yth. Pj. Wali Kota Cirebon  
c.q. Ketua Panitia Seleksi Instansi  
Pengadaan Pegawai ASN  
Kota Cirebon Tahun 2024  
di-  
Kota Cirebon

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI / PEREMPUAN\*)  
Pendidikan : .....  
Formasi yang dilamar : UMUM / KHUSUS DISABILITAS \*)  
Jabatan yang dilamar : .....  
Unit Kerja Penempatan : .....  
Alamat sesuai KTP : .....  
Nomor HP : .....

mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2024.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan scan dokumen asli yang diunggah melalui laman [https:// sscasn.bkn.go.id/](https://sscasn.bkn.go.id/) terdiri dari:

1. Pas Foto latar belakang merah.
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Ijazah.
4. Transkrip Nilai.
5. Surat Pernyataan.
6. Dokumen pendukung lainnya. (Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai dengan keahliannya (khusus tenaga kesehatan); Surat keterangan disabilitas (khusus formasi disabilitas dll).

Demikian surat permohonan ini dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat Saya,



ttd  
( ..... )

**Keterangan :**

- Surat Lamaran diketik menggunakan komputer, ditandatangani sendiri dengan pena bertinta hitam/biru, dibubuhi materai elektronik (e-materai Rp. 10.000).
- Dokumen Pendukung lainnya yang dilampirkan disesuaikan dengan jenis kebutuhan jabatan yang dilamar berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pengumuman Wali Kota Cirebon.

\*) pilih salah satu

**Lampiran III**  
**CONTOH SURAT PERNYATAAN**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah dan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kota Cirebon dan **tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun** sejak diangkat sebagai CPNS.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., ..... 2024

Yang membuat pernyataan,



ttd (.....)

## Lampiran IV

### CONTOH SURAT KETERANGAN PENYANDANG DISABILITAS

FORMAT SURAT KETERANGAN PENYANDANG DISABILITAS	
<b>KOP SURAT RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS</b>	
<b>SURAT KETERANGAN</b>	
Nama :	Jenis Kelamin: Laki/Perempuan <sup>1)</sup>
Umur :	
NIK :	
Ada Disabilitas :	Ya/Tidak <sup>1)</sup>
Lokasi Disabilitas :	
	- Susunan syaraf pusat; sebutkan _____
	- Organ Penginderaan; sebutkan _____
	- Extremitas atas kanan/kiri/keduanya <sup>1)</sup>
	- Tangan dominan kanan/kiri <sup>1)</sup>
	- Extremitas bawah kanan/kiri/keduanya <sup>1)</sup>
	- Lain-lain _____
<b>ANAMNESIS<sup>1)</sup></b>	
1. Riwayat disabilitas :	- Sejak lahir, diagnosa _____ - Sesudah kecelakaan, pada tahun _____, diagnosa _____ - Sesudah sakit, pada tahun _____, diagnosa _____
2. Kemampuan mengurus diri <sup>1)</sup> :	- Mampu - Sebagian besar bisa, jelaskan yang tidak bisa _____ - Perlu bantuan peruh orang lain
3. Berpergian keluar rumah:	- Bisa sendiri/perlu di antar anggota keluarga <sup>1)</sup>
<b>HASIL PEMERIKSAAN<sup>1)</sup></b>	
4. Jenis Disabilitas:	
a. Disabilitas Fisk	
1) Amputasi (Tangan/Kaki) <sup>1)</sup>	
2) Kelemahan bagian atas anggota gerak atas dan bawah	
3) Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul)	
4) Cerebral Palsy (CP)	
b. Disabilitas Sensorik	
1) Netra	
a) Buta total	
b) Persepsi cahaya/low vision	
2) Rungu	
3) Wicara	
c. Disabilitas Intelektual	
1) Disabilitas grahita	
2) Down syndrome	